



Pemilu 2024 Diprediksi Muncul Pandemi Hoaks

Korporasi Global Pemilik Medsos Harus Diatur

JOGJA - Pakar bidang ilmu media dan jurnalisme Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Masduki memprediksi banjir hoaks bakal terjadi pada Pemilu 2024. Sebab, iklimnya berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena yang dihadapi lebih kompleks. "Akan terjadi pandemi. Pandemi hoaks, disinformasi," tegasnya, kemarin (29/11).

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pada Pemilu kali ini bukan hanya berkuat pada persaingan pertahana atau oposisi saja. Namun, sekarang lebih kompleks karena mengalami polarisasi lebih besar dan sangat banyak.

Jadi, diprediksi akan terjadi pandemi hoaks yang bisa menyerang Jokowi sebagai presiden dan anaknya. Termasuk antarkandidat tiga pasang capres-cawapres. Bahkan lebih kompleks lagi karena ada irisannya dengan pemilu legislatif. Diprediksi juga akan terjadi pola yang sama.

Menurutnya, kondisi ini diperlu-

kan keseriusan dalam penanganan. Sebab, sekarang yang diperlukan bukan hanya literasi digital atau pendidikan politik saja. Keduanya tidak cukup membendung pandemi hoaks yang sangat kompleks.

Menurutnya, paling penting adalah upaya seperti Dewan Pers, lembaga negara, KPU, komisi informasi untuk duduk bersama termasuk Bawaslu, bagaimana memisahkan antara pelaku politik dan buzzer, partai politik, anggota DPR bahkan istana, dari media, dari institusi media.

Instansi tersebut perlu duduk bersama dan merumuskan solusi. Apalagi, Indonesia mempunyai persoalan klasik, yaitu ada banyak media yang dimiliki oleh para politisi. "Nah itu pemicu hoaks di situ, media yang partisan, media yang dikuasai oleh politisi yang dipakai untuk kepentingan politik praktis," ujarnya.

Di saat yang sama ada namanya korporasi Youtube dan Google (dan seluruh media sosial, red) yang se-

betulnya dalam tanda petik membiarkan situasi ini. "Karena mereka kan korporasi global," lanjutnya.

Masduki menegaskan yang harus dibenahi ialah regulasinya. Korporasi global harus diatur oleh regulator, dalam hal ini ialah pemerintah. Misalnya dengan mendorong peraturan pemerintah. Bagaimana mengatur platform digital agar memberi ruang untuk konten yang bagus dan segera memfilter konten yang hoaks.

Jadi, tidak perlu mengencarkan patroli cyber atau upaya *take down* yang selama dilakukan dan tidak pernah ada habisnya. Namun, membunuh penyakit sejak dari akarnya yang dalam hal ini adalah pengelola platform global tersebut mulai diatur menggunakan regulasi yang sesuai.

Perusahaan korporasi global memiliki *policy* yang bisa disesuaikan dengan regulasi pemerintah Indonesia. Sehingga, secara singkatnya, para pengguna platform dan netizen di Indonesia sudah aman bermain

media sosial. Karena regulasi sudah mengikat dan konten yang potensi hoaks langsung terfilter sendiri sesuai algoritma. "Sepanjang ada aturan ketat dari pemerintah, mereka akan patuh. Kalau yang ngomong kita, tidak akan didengar oleh pengelola Twitter, Facebook, dan semua media sosial.

"Tapi kalau pemerintah yang memanggil, mereka akan patuh karena mereka yang punya. Nah sekarang pemerintahnya mau gak?," paparnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Mohammad Najib mengatakan dalam pengawasan pelanggaran, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Masyarakat diminta ikut terlibat dan peduli. Apalagi jika terjadi kampanye terselubung di banyak forum. Menurutnya, memang dibutuhkan pendalaman dan perspektif penuh kecurigaan. "Peningkatan sensitivitas kami untuk melihat fakta-fakta di lapangan khususnya terkait adanya potensi pelanggaran. Kami mendorong masyarakat untuk lapor kalau ada kampanye terselubung," jelasnya. (lan/din/by)



WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA
Prof Masduki

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005